



PISAgroNEWS

Partnership for Indonesia's Sustainable Agriculture

ISSUE NO 38

**APR
2024**



**Special Edition: Global Trade Updates on Agriculture, and
Regenerative Agriculture Trends**

Contact Us: contact@pisagro.org www.pisagro.org [@pisagro_secretariat](https://www.instagram.com/pisagro_secretariat) PISAgro



Daftar Isi

- 03 Kata Pengantar
*Opening Remarks***
- 04 Tentang PISAgro**
- 05 About PISAgro**
- 06 Prolog**
Konferensi Tingkat Menteri WTO ke-13:
Menggambarkan Arah Perdagangan Global
- 10 Prologue**
The 13th WTO Ministerial Conference: Charting the Course for Global Trade
- 14 Fitur**
Pakar Pertanian Membahas Peran Penting Pupuk dan Pendekatan Kolaboratif dalam Pertanian Regeneratif
- 17 Feature**
Agricultural Experts Discuss Critical Role of Fertilizers and Collaborative Approach in Regenerative Agriculture
- 20 Sorotan - PISAgro 2.0 (April 2024)**
- 23 Highlights - PISAgro 2.0 (April 2024)**
- 26 Sorotan**
- 29 Highlights**
- 32 Profil**
Memberdayakan Petani: Percakapan bersama Ibu Fatima, Petani Jagung dari Pamekasan, Jawa Timur.
- 34 Profile**
Empowering Farmers: A Conversation with Mrs. Fatima, a Corn Smallholder from Pamekasan, East Java

Tim Editorial

KONTEN

Fathan Oktrisaf
Ferial Lubis
Hendri Surya Widcaksana
Nadia Fairus
Nisrina Alissabila
William Widjaja

DESAIN & TATA LETAK

Hendri Surya Widcaksana

KONTRIBUTOR FOTO

Anggota & Mitra
PISAgro, Istimewa

Kata Pengantar



Insan Syafaat

Direktur Eksekutif
Sekretariat PISAgro

Rekan-rekan yang Terhormat,

Selamat datang di PISAgro News edisi April 2024. Pertama-tama, memasuki bulan April yang penuh sukacita ini, kami menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 H kepada para pembaca, mitra, dan komunitas global yang kami hormati. Semoga Idulfitri yang menggembirakan ini membawa kedamaian, kemakmuran, dan keharmonisan bagi semua.

Pada edisi kali ini, kami membuka edisi mengenai seluk-beluk dinamika perdagangan global dengan prolog kami yang bertajuk "Konferensi Tingkat Menteri WTO ke-13: Memetakan Arah Perdagangan Global". Saat negara-negara berkumpul untuk mempertimbangkan masa depan perdagangan, kami mengeksplorasi implikasinya terhadap pasar pertanian dan peran penting praktik berkelanjutan dalam membentuk lanskap.

Lanjut ke bagian berikutnya, artikel unggulan kami "Pakar Pertanian Membahas Peran Penting Pupuk dan Pendekatan Kolaboratif dalam Pertanian Regeneratif" menyoroti peran penting pupuk dan pendekatan kolaboratif dalam pertanian regeneratif. Melalui wawasan dari para ahli pertanian,

kami mengungkap pentingnya membina kemitraan dan inovasi untuk memelihara sistem pertanian yang berkelanjutan dan menjaga masa depan planet kita.

Selain itu, kami mendapat kehormatan untuk menyajikan percakapan intim dengan Ibu Fatima, Petani Jagung dari Pamekasan, Jawa Timur, sebagai bagian dari profil wawancara petani kami. Ibu Fatima berbagi perjalanan, tantangan, dan aspirasinya, menawarkan perspektif yang sangat berharga dalam memberdayakan petani dan mengembangkan mata pencarian berkelanjutan.

Dengan berbagai artikel, fitur, dan profil pada majalah ini, kami berharap edisi ini dapat memberikan pandangan yang menyeluruh tentang dinamika pertanian Indonesia dan mendorong kolaborasi lebih lanjut untuk memajukan sektor pertanian yang berkelanjutan dan inklusif.

Selamat membaca dan semoga informasi yang kami sajikan dapat menjadi panduan yang bermanfaat untuk menyambut tahun baru dengan semangat baru di sektor pertanian.

Opening Remarks



Insan Syafaat

Executive Director
PISAgro Secretariat

To our distinguished readers,

Welcome to the April 2024 edition of PISAgro News. First and foremost, as we entered this joyous month of April, we extend warm greetings of Eid Mubarak 1445 H to our cherished readers, partners, and the global community. May this joyous Eid Mubarak occasion bring peace, prosperity, and harmony to all.

In this edition, we open this edition about the intricacies of global trade dynamics with our prologue titled "The 13th WTO Ministerial Conference: Charting the Course for Global Trade." As nations convene to deliberate on the future of trade, we explore the implications for agricultural markets and the pivotal role of sustainable practices in shaping the landscape.

Moving on to the next section, our feature article "Agricultural Experts Discuss Critical Role of Fertilizers and Collaborative Approach in Regenerative Agriculture" shines a spotlight on the indispensable role of fertilizers and the collaborative approach in regenerative agriculture. Through insights from agricultural experts, we unravel the significance of fostering partnerships and

innovation to nurture resilient farming systems and safeguard our planet's future.

Furthermore, we are privileged to present an intimate conversation with Mrs. Fatima, a Corn Smallholder from Pamekasan, East Java, as part of our farmer interview profile. Mrs. Fatima shares her journey, challenges, and aspirations, offering invaluable perspectives on empowering farmers and cultivating sustainable livelihoods.

With the various articles, features, and profiles in this magazine, we hope this edition will provide a comprehensive view of the dynamics of Indonesian agriculture and encourage further collaboration to advance the sustainable and inclusive agricultural sector.

Happy reading, and may the information we present serve as a useful guide to welcoming the new year with renewed enthusiasm in the agricultural sector.



Kelompok Kerja

Setiap kelompok kerja wajib mengembangkan rantai pasok dengan lengkap dari hulu ke hilir dan menyusun rencana kerja yang meliputi kebutuhan permodalan, target produksi, target pembelian, target pelatihan petani, hingga waktu pelaksanaannya. Setiap rantai pasok melaksanakan berbagai proyek percontohan, mulai dari pelatihan petani mengenai pengelolaan kebun yang baik hingga membuka ketersediaan akses keuangan dan jaminan pembelian.

| | | | |
|---|----------------------------|---|------------------------|
|  | Agritech & Inovasi Digital |  | Kelapa Sawit |
|  | Kakao |  | Kentang |
|  | Kopi |  | Karet |
|  | Jagung |  | Kelapa |
|  | Susu |  | Padi |
|  | Hortikultura |  | Sapi Potong |
|  | Pemberdayaan Perempuan |  | Pengembangan Kapasitas |
|  | Kemampu-telusuran |  | Pendapatan Hidup |

Sekretariat PISAgro

Insan Syafaat
Direktur Eksekutif

Fathan Oktrisaf
Spesialis Pelibatan Strategis

Nisrina Alissabila
Spesialis Pelibatan Strategis

Hendri Surya Widcaksana
Manajer Komunikasi dan Media Sosial

Nadia Fairus
Manajer Perkantoran

Ferial Lubis
Konsultan Pendukung Hubungan Pemerintah

William Widjaja
Manajer Proyek



Working Groups

Every working group is required to develop their chain supply from their downstream line to the upstream as well as formulating a working plan which includes capital needs, production target, purchasing order target, farmers' training, as well as their training schedules. Every supply chain is also required to carry out various pilot projects, ranging from farmers' training on proper plantation management methods to enabling financial access and purchase protection.

| | | | |
|---|-------------------------------|---|-------------------|
|  | Agritech & Digital Innovation |  | Palm Oil |
|  | Cocoa |  | Potato |
|  | Coffee |  | Rubber |
|  | Corn |  | Coconut |
|  | Dairy |  | Rice |
|  | Horticulture |  | Cattle |
|  | Women Empowerment |  | Capacity Building |
|  | Traceability |  | Living Income |

PISAgro Secretariat

Insan Syafaat
Executive Director

Fathan Oktrisaf
Strategic Engagement Specialist

Nisrina Alissabila
Strategic Engagement Specialist

Hendri Surya Widcaksana
Communication and Social Media Manager

Nadia Fairus
Office Manager

Ferial Lubis
Government Relation Support Consultant

William Widjaja
Project Management Officer

Prolog

Konferensi Tingkat Menteri WTO ke-13: Menggambarkan Arah Perdagangan Global

Ferial Lubis

Laporan Khusus Konferensi Tingkat Menteri ke-13 Organisasi Perdagangan Dunia (WTO MC13) yang diadakan di Abu Dhabi, UEA



Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) merupakan satu-satunya organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional yang dibentuk sejak tahun 1995. Tujuan dari berbagai perjanjian WTO adalah untuk membantu produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam melakukan kegiatannya. Badan tertinggi di WTO adalah Konferensi Tingkat Menteri (KTM) yang dilaksanakan setiap dua tahun sekali. Di antara KTM, kegiatan-kegiatan pengambilan keputusan WTO dilakukan oleh Majelis Umum. Di bawahnya terdapat badan-badan subsider yang meliputi dewan, komite, dan sub-komite yang bertugas untuk melaksanakan dan mengawasi penerapan perjanjian-perjanjian WTO oleh negara anggota.

Konferensi Tingkat Menteri ke-13 Organisasi Perdagangan Dunia (WTO MC13) telah diselenggarakan di Abu Dhabi, UEA, tanggal 26 Februari - 2 Maret 2024. Forum ini dipimpin

bersama antara lain oleh Ketua KTM ke-13, Dr Thani bin Ahmed Al Zeyoudi.

Pertemuan KTM ke-13 WTO menghasilkan sejumlah capaian utama yaitu: bergabungnya Timor-Leste dan Comoros sebagai anggota baru WTO. Kedua negara bergabung dengan WTO setelah sukses menuntaskan rangkaian proses akses melalui program ekstensif reformasi domestik untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dengan penambahan keanggotaan baru ini, maka resmi mengantar WTO mempunyai 166 negara anggota. Capaian ini cukup istimewa mengingat kedua negara merupakan anggota kelompok LDCs serta jeda waktu yang cukup lama sejak WTO terakhir menerima anggota baru (sekitar 8 tahun).

Capaian lainnya pada KTM ke-13 adalah tercapainya kesepakatan untuk berbagai isu runding prioritas yakni reformasi sistem penyelesaian sengketa,

e-commerce, isu pembangunan dan Abu Dhabi *Ministerial Declaration*. Di lain pihak KTM belum mencapai kesepakatan untuk isu pertanian dan subsidi perikanan karena masih besarnya perbedaan pandangan dan posisi antar anggota. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan dengan anggota dari beberapa Kementerian/Lembaga teknis terkait. Selain menghadiri sidang pleno dan grup kecil, Ketua Delegasi Indonesia juga memimpin kelompok runding untuk isu khusus seperti G-33, guna memperjuangkan kepentingan nasional pada KTM ke-13 WTO.

Konferensi Tingkat Menteri ke-13 Organisasi Perdagangan Dunia (KTM13 WTO) sukses menyelesaikan Paket Abu Dhabi (*Abu Dhabi Package*), yang terdiri atas Deklarasi Para Menteri di Abu Dhabi (*Abu Dhabi Ministerial Declaration*), keputusan aksesi, reformasi penyelesaian sengketa, program kerja niaga elektronik, dan isu pembangunan.

Isu Keluaran Dokumen (Deklarasi Abu Dhabi)

Dalam tahap final pembahasan Dokumen Keluaran, masih diwarnai perdebatan mengenai pencantuman isu-isu tematis a.l. isu perdagangan dan industri, ruang kebijakan untuk pengembangan industri, inklusivitas, remitansi, dan isu terkait TRIPS. Karena berlarutnya perdebatan, AS sempat mengajukan usulan untuk mengadopsi dokumen kesepakatan dalam bentuk hybrid yang terdiri dari *Ministerial Declaration* untuk isu-isu yang berhasil disepakati dan *Chair's Summary* untuk isu-isu yang masih menjadi perdebatan. Namun demikian, usulan ini ditolak oleh sebagian besar anggota (termasuk Indonesia) karena berpotensi menunjukkan adanya perpecahan internal dan kurangnya solidaritas dalam WTO.

Pada akhir perundingan *Abu Dhabi Ministerial Declaration* menggarisbawahi dimensi pembangunan sebagai inti program kerja WTO, sekaligus mengakui peran penting sistem perdagangan multilateral dalam WTO termasuk dalam pencapaian Agenda 2030 untuk SDGs. Deklarasi Abu Dhabi sangat kental dengan komitmen pengarusutamaan dimensi pembangunan agar negara berkembang dan negara kurang berkembang (LDCs) dapat

terintegrasi ke dalam sistem perdagangan multilateral.

Deklarasi Abu Dhabi mendorong integrasi negara berkembang dan LDCs ke dalam perdagangan internasional melalui penekanan kembali sentralisasi dimensi pembangunan di dalam agenda kerja WTO, transfer teknologi, prioritas terhadap kebutuhan khusus negara-negara LDCs, dan peningkatan *Aid for Trade Initiative*.

Deklarasi Abu Dhabi sebagai dokumen utama mencakup komitmen politis mengenai reformasi WTO, peningkatan ketahanan rantai pasok global, kontribusi dalam pencapaian UN 2030 Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, pemberdayaan perempuan, fasilitasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perdagangan jasa, dan kesiapan menghadapi pandemi di masa depan.

Isu Pertanian

Perundingan outcome isu pertanian selama KTM terkonsentrasi pada tiga isu, yaitu. (i) keseimbangan antara tujuh pilar negosiasi, khususnya dalam hal ambisi, spesifisitas, dan *timeframe* penyusunan modalitas; (ii) *deliverables* konkret untuk LDCs; dan (iii) solusi permanen isu *Public Stockholding for Food Security Purposes* (PSH).

Proponen isu PSH berupaya agar KTM sepakati solusi permanen. Indonesia secara khusus lakukan penggalangan dukungan upaya ini lewat inisiatif penyelenggaraan PTM G-33 dan pertemuan co-sponsor proposal 229. Namun, non-proponen, khususnya AS dan Grup Cairns menolak keras upaya tersebut. Brazil secara khusus inginkan KTM ke-13 sepakati timeline perundingan yang jelas hingga KTM ke-14.

Terkait *deliverables* bagi LDCs, KTM jajaki dua usulan, yaitu pengecualian LDCs dari pemberlakuan pembatasan ekspor serta perluasan solusi interim Bali terkait PSH kepada LDCs. Namun, pada akhirnya anggota belum dapat menyetujui keluaran isu pertanian, termasuk *deliverables* bagi LDCs, akibat perbedaan pandangan yang sangat tajam terkait pendekatan perundingan pertanian (*holistik vs sequencing*) dan *timeframe* perundingan. Karena masih besarnya perbedaan pandangan antar anggota, pada akhirnya belum tercapai kesepakatan untuk isu pertanian.

Isu Reformasi Sistem Penyelesaian Sengketa

Reformasi Sistem Penyelesaian Sengketa Para Menteri Perdagangan WTO menegaskan kembali komitmen mereka untuk memulihkan sistem penyelesaian sengketa WTO pada 2024 sesuai mandat KTM12. Hal tersebut ditempuh dengan meneruskan dan mempercepat penyelesaian isu-isu yang belum terselesaikan (pending) terkait reformasi sistem penyelesaian sengketa seperti isu banding dan aksesibilitas. Reformasi sistem penyelesaian sengketa merupakan agenda prioritas KTM13 dan Indonesia. Komitmen yang dicetuskan para Menteri pada KTM13 dapat menjadi dorongan politis kuat untuk segera menyelesaikan berbagai isu yang menaungi sistem penyelesaian sengketa, termasuk isu banding agar sistem perdagangan multilateral tetap dapat menjaga keamanan dan kepastian hukum.

Akhir pembahasan Isu Reformasi Sistem Penyelesaian Sengketa mencatat berbagai upaya yang telah dilakukan untuk melaksanakan komitmen pada KTM ke-12 WTO menuju berfungsinya kembali sistem penyelesaian sengketa yang dapat diakses oleh seluruh anggota pada 2024; mengakui kemajuan yang telah dihasilkan serta berbagai submisi Anggota dan memandatkan delegasi untuk mempercepat proses diskusi, dengan berbasis pembahasan yang telah dicapai serta berupaya atas isu yang belum terpecahkan, termasuk mengenai *appeal review*. Sebagai catatan, atas desakan sebagian besar negara berkembang, paragraf mengenai komitmen politik serta frasa "to achieve convergence by 2024" tidak direfleksikan di draft terakhir.

Selain itu, pada pertemuan Indonesia dengan Fasilitator Menteri DSB (Espen Barth Eide), Fasilitator Menteri menyambut baik usulan Indonesia untuk mengembalikan fungsi penyelesaian sengketa dua tingkat (*two-tier dispute settlement system*) dengan menerapkan seluruh aturan pada Pemahaman Penyelesaian Sengketa (DSU) secara sukarela, termasuk menunjuk anggota Badan Banding WTO. Secara paralel, seluruh anggota WTO dapat melanjutkan pembahasan reformasi penyelesaian sengketa sehingga sistem penyelesaian sengketa dapat diakses oleh seluruh anggota WTO secara penuh, efisien, dan efektif.

Isu Pembangunan

Pembahasan pada sesi isu pembangunan tidak

terdapat penolakan atas peran penting S&DT bagi anggota negara berkembang dan LDCs untuk meningkatkan partisipasi atau integrasi ke dalam sistem perdagangan multilateral, memperluas pasar, dan adanya *Technical Assistance and Capacity Building* (TACB).

KTM ke 13 menyepakati pula suatu keputusan untuk mendukung anggota WTO yang telah lulus dari kategori LDC menurut Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) agar memperoleh kemudahan untuk berpartisipasi dalam perdagangan internasional dan memperoleh masa transisi, Indonesia turut menyambut baik keputusan ini seperti anggota lainnya. Negara-negara tersebut akan juga mendapatkan berbagai program peningkatan kapasitas dan bantuan teknis.

Selain itu, terdapat pandangan bahwa selesainya perjanjian *Investment Facilitation for Development* (IFD) sebagai perkembangan positif dalam menciptakan lingkungan Investasi untuk tujuan pembangunan. Namun validitas di dalam arsitektur hukum WTO masih dipertanyakan oleh India dan Afrika Selatan.

Isu E-Dagang

KTM13 mengeluarkan keputusan untuk memperpanjang pembahasan program kerja perdagangan elektronik dan moratorium transaksi melalui transmisi elektronik. Kali ini, program kerja dan moratorium diperpanjang hingga penyelenggaraan KTM14 atau paling lama 31 Maret 2026. Sehingga, pelaksanaan kebijakan nasional mengenai transmisi elektronik dan pemberdayaan UMKM yang memanfaatkan teknologi atau perangkat lunak dapat terus dilanjutkan pemerintah secara simultan.

Sebagai catatan, Indonesia menjadi negara terakhir yang tetap konsisten menyampaikan tidak dapat menerima keputusan perpanjangan moratorium, hingga saat terakhir menjelang penutupan KTM. Namun dengan memperhatikan dinamika di lapangan dan atas pertimbangan arahan Pusat, akhirnya Indonesia dapat menyetujui teks final dengan revisi penambahan tanggal 31 Maret 2026 sebagai tanggal paling lama penerapan moratorium, sekiranya KTM ke-14 WTO dilaksanakan setelah tanggal tersebut.

Keputusan Menteri mengenai e-dagang memutuskan untuk meneruskan diskusi lebih

lanjut mengenai ruang lingkup, definisi, dan dampak moratorium bea masuk atas transmisi elektronik terhadap pembangunan, serta mencari jalan untuk menyetarakan kapasitas industrialisasi digital Anggota negara berkembang dan LDCs dengan negara maju. Selain itu, moratorium diputuskan untuk diperpanjang hingga KTM ke-14 WTO atau selambatnya pada tanggal 31 Maret 2026. *Moratorium dan Work Programme on E-Commerce* juga akan berakhir pada tanggal tersebut.

Tindaklanjut

- Perluasan keanggotaan WTO, dengan masuknya Timor Leste dan Comoros sebagai anggota baru WTO, dapat pula menjadi peluang pemanfaatan akses pasar kedua negara oleh Indonesia, terutama Timor Leste dengan tingkat tarif rata-rata lebih rendah.
- Indonesia perlu menggali kemungkinan untuk mengembalikan fungsi penyelesaian sengketa dua tingkat secara sukarela dan menyusun non-paper atas hal tersebut untuk kernudian disampaikan kepada WTO.
- Perlunya antisipasi upaya anggota WTO proponen moratorium akan mencari langkah dan strategi lain agar moratorium dapat terus dilanjutkan. Hal ini akan dilakukan antara lain dengan memasukkan isu moratorium dalam pembahasan work programme on e-commerce pada KTM ke-14 (paragraf 4 Keputusan Menteri) maupun mendorong lebih banyak anggota untuk bergabung dalam perundingan plurilateral JSI dalam E-Dagang. Untuk itu, kiranya Indonesia perlu melakukan rekalibrasi strategi diplomasi, termasuk meninjau keikutsertaan Indonesia dalam JSI on e-dagang serta menggalang dukungan anggota LDCs terkait isu moratorium, dan penyusunan komunikasi/paper tambahan yang dapat memperkuat posisi Indonesia.
- Perlunya meningkatkan pelibatan dengan berbagai kelompok terkait Proposal 229, termasuk untuk peroleh dukungan LDCs, dan bangun pemahaman non-proponen terkait urgensi solusi permanen. Secara khusus, Indonesia harus dapat "menjual" secara lebih meyakinkan capaian program PSH-nya dalam konteks ketahanan pangan domestik, dan pelaksanaannya yang tidak mendistorsi pasar.

- Melakukan konsolidasi penempatan internal G-33 terkait isu pertanian lainnya. Terdapat kepentingan untuk akomodasi aspirasi anggota juga terkait kemajuan isu *Special Safeguard Mechanism (SSM)* dan *Special Products*. Mendorong pembahasan yang lebih mendalam terkait penyesuaian *External Reference Price (ERP)* dalam berbagai pertemuan isu pertanian di Jenewa. Sebagai catatan, India kemungkinan akan kembali gunakan ancaman penghentian moratorium bea masuk transmisi elektronik sebagai bargaining chip untuk mendorong penyesuaian ERP pada KTM ke-14.

Sumber: Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

Prologue

The 13th WTO Ministerial Conference: Charting the Course for Global Trade

Ferial Lubis

Special Report of the 13th Ministerial Conference of the World Trade Organization (WTO MC13) held in Abu Dhabi, UAE



World Trade Organization (WTO) is the only international organization that regulates international trade, established since 1995. The aim of various WTO agreements is to assist producers of goods and services, exporters, and importers in their activities. The highest body in the WTO is the Ministerial Conference (MC), which is held every two years. Between MCs, decision-making activities of the WTO are carried out by the General Council. Below it are subsidiary bodies including councils, committees, and sub-committees responsible for implementing and overseeing the application of WTO agreements by member countries.

The 13th Ministerial Conference of the World Trade Organization (WTO MC13) was held in Abu Dhabi, UAE, from February 26 to March 2, 2024.

The forum was jointly led by, among others, the Chair of the 13th Ministerial Conference, Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi.

The 13th WTO Ministerial Conference achieved several significant outcomes, including the accession of Timor-Leste and Comoros as new WTO members. Both countries joined the WTO after successfully completing a series of accession processes through extensive domestic reform programs to accelerate economic growth. With the addition of these new memberships, the WTO officially counts 166 member countries. This achievement is noteworthy considering that both countries were members of the Least Developed Countries (LDCs) group and the significant gap since the WTO last accepted new members (approximately 8 years).

Another achievement of the 13th Ministerial Conference was the agreement reached on various priority negotiation issues, including reforming the dispute settlement system, e-commerce, development issues, and the Abu Dhabi Ministerial Declaration. However, the conference did not reach an agreement on agricultural issues and fishery subsidies due to significant differences in views and positions among members. The Indonesian delegation, led by the Director-General of International Trade Negotiations, Ministry of Trade, with members from several relevant Ministries/Technical Agencies, emphasized the importance of strengthening and modernizing the dispute settlement system to ensure its effectiveness and relevance in the constantly changing global trade landscape.

The 13th WTO Ministerial Conference successfully agreed on the Abu Dhabi Package, consisting of the Abu Dhabi Ministerial Declaration, accession decisions, dispute settlement reform, e-commerce work program, and development issues.

The Outcome Document issue (Abu Dhabi Declaration)

The Outcome Document issue (Abu Dhabi Declaration) was still under debate regarding the inclusion of thematic issues such as trade and industry, policy space for industrial development, inclusivity, remittance, and issues related to TRIPS. However, due to prolonged debates, the United States proposed adopting a hybrid agreement document consisting of a Ministerial Declaration for agreed-upon issues and a Chair's Summary for issues still under debate. Nevertheless, this proposal was rejected by most members (including Indonesia) due to its potential to indicate internal divisions and lack of solidarity within the WTO.

In the final stage of the Outcome Document discussion, the Abu Dhabi Ministerial Declaration highlighted the development dimension as the core of the WTO work program, while recognizing the crucial role of the multilateral trading system in the WTO's achievements and the Agenda 2030 for SDGs. The Abu Dhabi Declaration strongly emphasized the commitment to mainstreaming the development dimension

to ensure that developing countries and LDCs can integrate into the multilateral trading system.

The Abu Dhabi Declaration encouraged the integration of developing countries and LDCs into international trade by reaffirming the centralization of the development dimension in the WTO work agenda, technology transfer, prioritization of the special needs of LDCs, and enhancement of the Aid for Trade Initiative.

Furthermore, the Abu Dhabi Declaration as the main document included political commitments on WTO reform, increasing resilience in global supply chains, contributing to the achievement of the UN 2030 Agenda for Sustainable Development Goals, empowering women, facilitating micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs), trade in services, and readiness to face future pandemics.

The Agriculture Issue

The outcome negotiations on agriculture during the MC were concentrated on three issues: (i) balancing the seven negotiation pillars, particularly in terms of ambition, specificity, and timeframe for modalities drafting; (ii) concrete deliverables for LDCs; and (iii) permanent solutions to the issue of Public Stockholding for Food Security Purposes (PSH).

The proponents of the PSH issue sought to agree on a permanent solution during the MC. Specifically, Indonesia campaigned for support for this effort through the organization of the G-33 PTM initiative and co-sponsorship meetings for proposal 229. However, non-proponents, especially the US and Cairns Group, strongly opposed these efforts. Brazil, in particular, wanted the 13th MC to agree on a clear negotiation timeline until the 14th MC.

Regarding deliverables for LDCs, the MC explored two proposals: the exemption of LDCs from the implementation of Export Restrictions and the expansion of the Bali interim solution related to PSH to LDCs. However, in the end, members could not agree on agricultural issues, including deliverables for LDCs, due to sharp differences in views on agricultural negotiation approaches (holistic vs. sequencing) and negotiation timeframes. Due to the significant divergence of views among members, an agreement on agricultural issues was not reached.

Dispute Settlement System Reform Issue

The Ministers of WTO Trade reaffirmed their commitment to restore the WTO dispute settlement system by 2024 as mandated by the 12th MC. This was done by continuing and accelerating the resolution of pending issues related to dispute settlement system reform, such as appellate body issues and accessibility. Reforming the dispute settlement system was a priority agenda for the 13th MC and Indonesia. The commitments made by the Ministers at the 13th MC could serve as a strong political push to resolve various issues surrounding the dispute settlement system, including appellate body issues, so that the multilateral trading system can continue to ensure legal security and certainty.

The conclusion of the Dispute Settlement System Reform Issue discussion noted various efforts made to implement the commitments made at the 12th WTO MC towards the restoration of a dispute settlement system accessible to all members by 2024; recognizing progress made and various submissions by Members and mandating delegations to accelerate the discussion process, based on the discussions already reached and efforts to address unresolved issues, including appeal review. As a note, at the insistence of most developing countries, the paragraph on political commitments and the phrase "to achieve convergence by 2024" were not reflected in the final draft.

Additionally, in the meeting between Indonesia and the DSB Facilitator Minister (Espen Barth Eide), the Facilitator Minister welcomed Indonesia's proposal to restore the two-tier dispute settlement system voluntarily by applying all rules under the Dispute Settlement Understanding (DSU) on a voluntary basis, including appointing members of the WTO Appellate Body. In parallel, all WTO members can continue the discussion on dispute settlement reform so that the dispute settlement system can be fully, efficiently, and effectively accessible to all WTO members.

Development Issue

Discussions on the development issue session did not see any rejection of the important role of

S&DT for developing country members and LDCs to increase their participation or integration into the multilateral trading system, expand markets, and have Technical Assistance and Capacity Building (TACB).

The 13th MC also agreed on a decision to support WTO members who have graduated from the LDC category according to the United Nations (UN) to facilitate their participation in international trade and provide transition periods. Indonesia welcomed this decision like other members. These countries will also receive various capacity-building programs and technical assistance.

Moreover, there is a view that the conclusion of the Investment Facilitation for Development (IFD) agreement is a positive development in creating an investment environment for development purposes. However, its validity within the WTO legal architecture is still questioned by India and South Africa.

E-Commerce Issue

The 13th MC made a decision to extend the discussion on the e-commerce work program and the moratorium on electronic transmission transactions. This time, the work program and moratorium were extended until the convening of the 14th MC or no later than March 31, 2026. Thus, the implementation of national policies regarding electronic transmission and empowerment of MSMEs utilizing technology or software can continue simultaneously by governments.

As a note, Indonesia was the last country to consistently express its inability to accept the decision to extend the moratorium until the last moment before the closure of the MC. However, considering the dynamics on the ground and based on guidance from the Center, Indonesia finally agreed to the final text with the addition of the date March 31, 2026, as the latest date for the implementation of the moratorium, if the 14th WTO MC is held after that date.

The Ministerial Decision on E-Commerce decided to continue further discussions on the scope, definition, and impact of the electronic transmission customs duty moratorium on development and find ways to equalize the digital industrialization capacities of developing country

members and LDCs with those of developed countries. In addition, the moratorium was decided to be extended until the 14th WTO MC or no later than March 31, 2026. The moratorium and Work Programme on E-Commerce will also end on that date.

and Special Products. Encourage deeper discussions on External Reference Price (ERP) adjustments in various agricultural issue meetings in Geneva. As a note, India may likely use the threat of discontinuing the electronic transmission customs duty moratorium as a bargaining chip to push for ERP adjustments at the 14th MC.

Follow-Ups

- The expansion of WTO membership, with the entry of Timor-Leste and Comoros as new WTO members, could also be an opportunity to utilize the market access of both countries by Indonesia, especially Timor-Leste with lower average tariff rates.
- Indonesia needs to explore the possibility of voluntarily restoring the two-tier dispute settlement function and prepare a non-paper on this matter to be presented to the WTO.
- There is a need to anticipate efforts by WTO member proponents of the moratorium to seek other steps and strategies to continue the moratorium. This will be done, among other things, by including moratorium issues in the work program on e-commerce discussions at the 14th MC (paragraph 4 of the Ministerial Decision) and encouraging more members to join the plurilateral negotiations in the JSI on E-Commerce. Therefore, Indonesia may need to recalibrate its diplomatic strategy, including reviewing Indonesia's participation in the JSI on e-commerce and rallying support from LDC members regarding the moratorium issue, as well as preparing additional communication/papers to strengthen Indonesia's position.
- There is a need to increase engagement with various groups related to Proposal 229, including gaining support from LDCs, and building non-proponent understanding regarding the urgency of permanent solutions. Specifically, Indonesia must convincingly "sell" its PSH program achievements in the context of domestic food security resilience and its market-distorting implementation.
- Internal consolidation of G-33 positioning on other agricultural issues is needed. There is an interest in accommodating member aspirations related to the progress of the Special Safeguard Mechanism (SSM)

Source: Directorate General of International Trade Negotiations, Ministry of Trade of the Republic of Indonesia

Fitur

Pakar Pertanian Membahas Peran Penting Pupuk dan Pendekatan Kolaboratif dalam Pertanian Regeneratif

Hendri Surya Widcaksana



Pertanian regeneratif adalah pendekatan evolusioner, berbasis ilmiah, dan berorientasi pada hasil dalam bercocok tanam, dan memiliki peran penting dalam menjaga keamanan pangan dan gizi yang berkelanjutan. Pusat dari pendekatan ini adalah penggunaan pupuk secara strategis.

Dalam sebuah webinar terbaru "Menjamin nutrisi tanaman yang berkelanjutan: peran pupuk dalam pertanian regeneratif", para pemimpin industri berkumpul untuk membahas keterkaitan mendesak antara praktik-praktik regeneratif, penggunaan pupuk, dan keamanan pangan global. Dialog ini, kaya akan wawasan dari para ahli seperti Paz, Marina, dan Jan Willem, menekankan pentingnya tindakan kolaboratif dalam

menavigasi kompleksitas pertanian modern.

Meskipun pupuk secara historis telah dikaitkan dengan kerusakan lingkungan, ketika diintegrasikan secara strategis dalam praktik-praktik regeneratif, mereka dapat meningkatkan kesehatan tanah dan memperkuat siklus nutrisi, yang mengarah pada hasil yang tangguh dan keamanan pangan.

Majukan Praktik Pertanian Regeneratif

Pembuka dialog ini adalah Paz Panunzio Moscoso dari Yara, suarayang terkemuka dalam advokasi praktik pertanian berkelanjutan. Menyampaikan kepada audiens yang

beragam, Paz mengartikulasikan pentingnya sentral pupuk dalam sebuah wacana terbaru. Menekankan perlunya memaksimalkan produktivitas dalam domain pertanian yang ada, Paz menjelaskan interaksi rumit antara penyediaan nutrisi dan kesuburan tanah.

Inti dalam argumen Paz adalah peran tidak dapat digantikan dari pupuk dalam memperkuat kesuburan tanah. Dengan pertanian saat ini menyumbang sebagian besar emisi gas rumah kaca global, taruhannya tinggi. Membahas keseimbangan halus antara produktivitas dan keberlanjutan lingkungan, Paz menekankan perlunya pendekatan multiaspek.

Pada dialog ini, selain menyoroti kebutuhan pragmatis akan pupuk, juga menekankan implikasi lebih luasnya terhadap keamanan pangan global. Di tengah-tengah lahan pertanian yang semakin menyusut dan degradasi lingkungan yang meningkat, penggunaan pupuk secara bertanggung jawab muncul sebagai paku pengaman dalam menghindari krisis potensial.

Saat dialog berlanjut, para pemangku kepentingan diimbau untuk mendengarkan panggilan keras Paz untuk menjaga keseimbangan yang bijaksana antara produktivitas dan keberlanjutan. Dalam menavigasi medan perkembangan pertanian yang rumit, peran pupuk mengambil peran penting—sebagai batu penjuru dalam bangunan keamanan pangan global.

Pendekatan Kolaboratif untuk Pertanian Berkelanjutan

Marina Ettl, figur penting dalam penelitian dan pengembangan pertanian, menekankan pentingnya mengintegrasikan teknik-tradisional dan modern untuk mengoptimalkan kesehatan tanah. Dia menyoroti investigasi terbaru tentang kesehatan tanah, menyarankan pendekatan sinergis yang menggabungkan

metode organik dan konvensional. Marina menekankan bahwa sementara pertanian organik menawarkan manfaat lingkungan, itu seringkali menghasilkan hasil yang lebih rendah, seperti yang didukung oleh temuan ilmiah. Dia berjuang untuk pendekatan yang seimbang yang meningkatkan kesuburan tanah sambil memaksimalkan produktivitas, sejalan dengan prinsip-prinsip pertanian regeneratif.

Jan Willem, yang memimpin departemen pengadaan pertanian di LM Weston, mengulangi sentimen Marina, menekankan perlunya kolaborasi di seluruh rantai nilai. Sebagai pemain utama dalam pasar produk kentang beku, LM Weston mengakui tuntutan konsumen yang semakin meningkat untuk produk yang berkelanjutan. Jan Willem menekankan peran praktik regeneratif dalam menstabilkan hasil dan meningkatkan ketahanan, mengatribusikan manfaat-manfaat ini pada peningkatan kesehatan tanah. Dia mengakui kompleksitas perjalanan keberlanjutan, menyinggung tantangan dalam pengumpulan data dan insentif petani.

Kedua pembicara menekankan pentingnya kemitraan dengan perusahaan pupuk dan kimia, serta organisasi pemerintah dan non-pemerintah. Mereka menekankan perlunya solusi yang disesuaikan yang mempertimbangkan variasi regional dalam jenis tanah, iklim, dan praktik pertanian. Jan Willem menyoroti kolaborasi yang sedang berlangsung dengan petani, mencatat keragaman perspektif dan kebutuhan fleksibilitas dalam menerapkan praktik-praktik yang berkelanjutan.

Mengatasi Tantangan Sosial Ekonomi

Salah satu pertanyaan sentral yang diajukan dalam webinar adalah bagaimana memperluas adopsi alternatif rendah karbon dalam rantai pasokan pertanian. Yara menekankan

pentingnya menyelaraskan solusi dengan tantangan dan peluang spesifik yang ada di setiap situs produksi. Sementara metode historis seperti memanfaatkan energi air mungkin tidak secara universal berlaku, fokus tetap pada menemukan pendekatan yang spesifik lokasi untuk mengurangi jejak karbon secara efektif.

Webinar menyoroti meningkatnya permintaan global untuk pupuk rendah karbon, didorong oleh kebutuhan perusahaan, khususnya di sektor pangan, untuk mengurangi jejak karbon mereka. Yara menekankan pentingnya mempertahankan kualitas produk dan presisi dalam aplikasi untuk memastikan adopsi yang sukses oleh petani. Bio-stimulan dan strategi peningkatan kesehatan tanah seperti tanaman penutup disebut sebagai jalan yang menjanjikan untuk pertanian yang berkelanjutan.

Aspek penting dari pendekatan Yara melibatkan mengatasi tantangan sosial ekonomi yang terkait dengan praktik pertanian yang berkelanjutan. Perusahaan menekankan perlunya semua pemangku kepentingan, termasuk petani, mendapatkan manfaat dari praktik-praktik ini. Kolaborasi di seluruh rantai nilai dipandang sebagai esensial untuk mencapai keseimbangan ini, memastikan peningkatan profitabilitas bagi petani dan praktik pertanian yang berkelanjutan.

Dalam penutupan, simposium berakhir dengan nada komitmen yang teguh. Yara mengulangi komitmennya untuk bertindak dalam ranah pertanian yang berkelanjutan. Kolaborasi, solusi yang disesuaikan, dan evaluasi berkelanjutan ditekankan sebagai komponen kritis dalam menavigasi transisi ke praktik yang lebih berkelanjutan. Sementara diskusi berlanjut dan inisiatif berkembang, Yara tetap berdedikasi untuk mendorong perubahan positif dalam sektor pertanian.

Upaya Berkelanjutan dan Komitmen yang Ditegaskan Kembali

Yara menyoroti upaya berkelanjutan untuk memantau dan mengevaluasi hasil-hasil praktik pertanian yang berkelanjutan. Ini termasuk berinvestasi dalam penelitian dan pengumpulan data untuk melacak peningkatan dalam kesehatan tanah dan keseluruhan keberlanjutan. Perusahaan menekankan pentingnya menyesuaikan pendekatan berdasarkan kondisi lokal dan melibatkan pemangku kepentingan sepanjang proses.

Feature

Agricultural Experts Discuss Critical Role of Fertilizers and Collaborative Approach in Regenerative Agriculture

Hendri Surya Widcaksana



Regenerative agriculture is an evolving, science-based and outcome-focused approach to farming, and has a significant role to play in safeguarding food security and sustainable nutrition. Central to this approach is the strategic utilisation of fertilizers.

In a recent webinar of "Securing sustainable crop nutrition: the role of fertilizers in regenerative agriculture", industry leaders converged to address the pressing nexus between regenerative practices, fertilizer use, and global food security. The dialogue, rich with insights from experts like Paz, Marina, and Jan Willem, underscored the imperative for collaborative action in navigating the complexities of modern agriculture.

While fertilizers have historically been

associated with environmental harm, when strategically integrated within regenerative practices, they can foster soil health and bolster nutrient cycles, leading to resilient yields and food security.

Advancing Regenerative Agriculture Practices

At the forefront of this dialogue is Paz Panunzio Moscoso from Yara, an eminent voice advocating for sustainable agricultural practices. Addressing a diverse audience, Paz articulated the pivotal significance of fertilizers in a recent discourse. Emphasizing the need to maximize productivity within existing agricultural domains, Paz elucidated the intricate interplay between nutrient replenishment and soil fertility.

Central to Paz's argument is the indispensable role of fertilizers in fortifying soil fertility. With agriculture currently accounting for a substantial portion of global greenhouse gas emissions, the stakes are high. Expounding on the delicate balance between productivity and environmental sustainability, Paz underscored the need for a multifaceted approach.

The discourse, while shedding light on the pragmatic necessity of fertilizers, also accentuated the broader implications for global food security. Against a backdrop of dwindling arable land and escalating environmental degradation, the responsible utilization of fertilizers emerges as a linchpin in averting potential crises.

As the dialogue continues, stakeholders are urged to heed Paz's clarion call for a judicious balance between productivity and sustainability. In navigating the intricate terrain of agricultural development, the role of fertilizers assumes paramount importance—a cornerstone in the edifice of global food security.

Collaborative Approach for Sustainable Farming

Marina Ettl, a prominent figure in agricultural research and development, underscored the importance of integrating traditional and modern techniques to optimize soil health. She highlighted recent investigations into soil health, suggesting a synergistic approach that combines organic and conventional methods. Marina stressed that while organic farming offers environmental benefits, it often leads to lower yields, as supported by scientific findings. She advocated for a balanced approach that enhances soil fertility while maximizing productivity, aligning with the principles of regenerative agriculture.

Jan Willem Sepers, leading the agricultural sourcing department at LM Weston, echoed Marina's sentiments, emphasizing the need for collaboration across the value chain. As a major player in the frozen potato products market, LM Weston recognizes the growing consumer demand for sustainable products. Jan Willem emphasized the role of regenerative practices in stabilizing yields and enhancing resilience, attributing these benefits to improved soil health. He acknowledged the complexity of the sustainability journey, citing challenges in data collection and grower incentivization.

Both speakers emphasized the importance of partnerships with fertilizer and chemical companies, as well as governmental and non-governmental organizations. They stressed the need for tailored solutions that consider regional variations in soil types, climates, and farming practices. Jan Willem highlighted ongoing collaborations with growers, noting the diversity of perspectives and the necessity of flexibility in implementing sustainable practices.

Addressing Socioeconomic Challenges

One of the central questions raised in the webinar was how to scale the adoption of low-carbon alternatives in agriculture supply chains. Yara emphasized the importance of tailoring solutions to the specific challenges and opportunities present at each production site. While historical methods like utilizing water energy may not be universally applicable, the focus remains on finding location-specific approaches to reduce carbon footprints effectively.

The webinar highlighted the increasing global demand for low-carbon fertilizers, driven by the need for companies, especially in the food sector, to reduce their carbon footprint. Yara emphasized the importance of maintaining product quality and precision

in application to ensure successful adoption by farmers. Bio-stimulants and soil health improvement strategies such as cover crops were mentioned as promising avenues for sustainable agriculture.

A crucial aspect of Yara's approach involves addressing the socioeconomic challenges associated with sustainable farming practices. The company stressed the need for all stakeholders, including farmers, to benefit from these practices. Collaboration across the entire value chain is seen as essential to achieving this balance, ensuring increased profitability for farmers and sustainable agricultural practices.

Ongoing Efforts and Reaffirmed Commitments

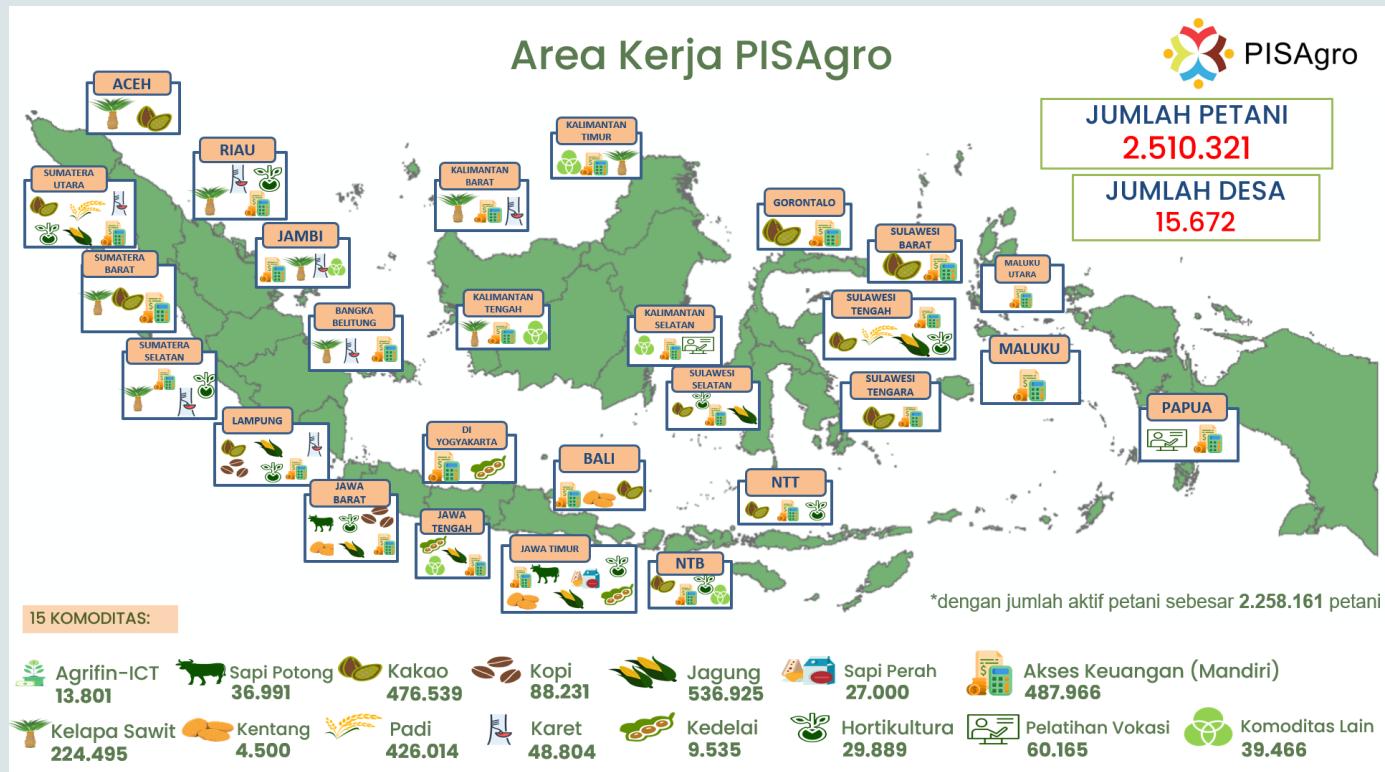
Yara highlighted ongoing efforts to monitor and evaluate the outcomes of sustainable farming practices. This includes investing in research and data collection to track improvements in soil health and overall sustainability. The company emphasized the importance of customizing approaches based on local conditions and engaging stakeholders throughout the process.

In closing, the symposium concluded on a note of resolute commitment. Yara reiterated its commitment to action in the realm of sustainable agriculture. Collaboration, tailored solutions, and ongoing evaluation were emphasized as critical components of navigating the transition to more sustainable practices. As discussions continue and initiatives evolve, Yara remains dedicated to driving positive change in the agricultural sector.

Sorotan

Capaian Dasbor PISAgro 2.0 Saat Ini - April 2024

Hendri Surya Widcaksana, William Widjaja



PISAGRO 2.0 DASHBOARD



74
desa

20.576
petani

26.386
ha lahan

OVERVIEW

GROWTH

37%
7.577 dari 20.576

dari total petani memiliki akses kepada bantuan finansial (KUR, pinjaman, hibah)

93%

dari total hasil panen petani dibeli langsung oleh perusahaan (107.941 ton hasil panen)

22%
4.621 dari 20.576

dari total petani berpartisipasi dalam lembaga koperasi

RESILIENCE

50%

37 dari 74

desa didukung oleh perusahaan dalam kualitas ketahanan hidup

setidaknya
 **2**

fasilitas penunjang kesehatan petani beroperasi dan didukung oleh perusahaan di setiap desa

Jenis aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kualitas kesehatan petani:

35
kampanye

32 (dilakukan 1-2 kali dalam setahun)
sosialisasi

SUSTAINABILITY

51%
38 dari 74

desa didukung oleh perusahaan dalam implementasi pertanian berkelanjutan

51%
8.494 dari 16.795 ha lahan

Jenis aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendukung petani mengimplementasikan manajemen limbah:

71
kampanye

89
sosialisasi

83 (dilakukan 2-3 kali dalam setahun)
pelatihan

GROWTH

37%

7.577 dari 20.576

dari total petani memiliki akses kepada bantuan finansial (KUR, pinjaman, hibah)

93%

dari total hasil panen petani dibeli langsung oleh perusahaan (107.941 ton hasil panen)

22%

dari total petani berpartisipasi dalam lembaga koperasi

33%

dari total petani berpartisipasi dalam pelatihan praktik pertanian baik yang dilakukan oleh perusahaan (dalam 2-3 kali setahun)

33%

7.031 dari 20.576

dari total petani telah mengimplementasikan Praktik Pertanian yang baik¹ dalam setiap proses produksinya

→ 4.380 petani mengimplementasikan Praktik Pertanian Baik dalam input-sourcing

→ 4.299 petani mengimplementasikan Praktik Pertanian Baik dalam penanganan pasca-panen

→ 4.140 petani mengimplementasikan Praktik Pertanian Baik dalam operasi pertanian

Rata-rata pendapatan petani per bulan dari tiap komoditas:



4.200.000



5.000.000



2.500.000



3.500.000

¹ Praktik Pertanian Baik (PPB/GAP) adalah pedoman yang umum digunakan oleh petani untuk membantu upaya implementasi praktik pertanian berkelanjutan dan untuk memastikan kualitas dan keamanan produk

RESILIENCE



setidaknya

2

fasilitas penunjang kesehatan petani beroperasi dan didukung oleh perusahaan di setiap desa

37%

7.529 dari 20.576
total petani
mengimplementasikan
praktik pencegahan
bencana



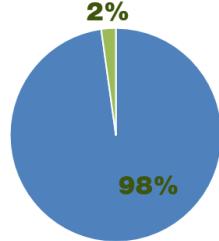
- 5.373 petani menggunakan peralatan yang memadai untuk menghadapi bencana iklim
- 5.638 petani mengimplementasikan praktik pertanian yang dapat mencegah bencana kebakaran
- 7.645 petani mengimplementasikan praktik pertanian yang dapat mencegah bencana banjir

Jenis aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kualitas kesehatan petani:

35 kampanye **32** sosialisasi

Dilakukan 1-2 kali dalam setahun

Rata-rata kondisi kesehatan petani dalam setiap desa²



² berdasarkan kondisi data check-up tahunan

SUSTAINABILITY



51%

8.494 dari 16.795 ha lahan

dari total lahan kelapa sawit perusahaan
berada di bawah pengelolaan lahan
berkelanjutan

Aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam mendukung petani dalam implementasi:

Pengelolaan Lahan Berkelanjutan

45 kampanye **45** sosialisasi **43** pelatihan dilakukan 2-3 kali setiap tahunnya

Manajemen Limbah

71 kampanye **89** sosialisasi **83** pelatihan dilakukan 2-3 kali setiap tahunnya

Manajemen Biodiversitas

3 kampanye **2** sosialisasi **3** pelatihan dilakukan 1 kali setiap tahunnya

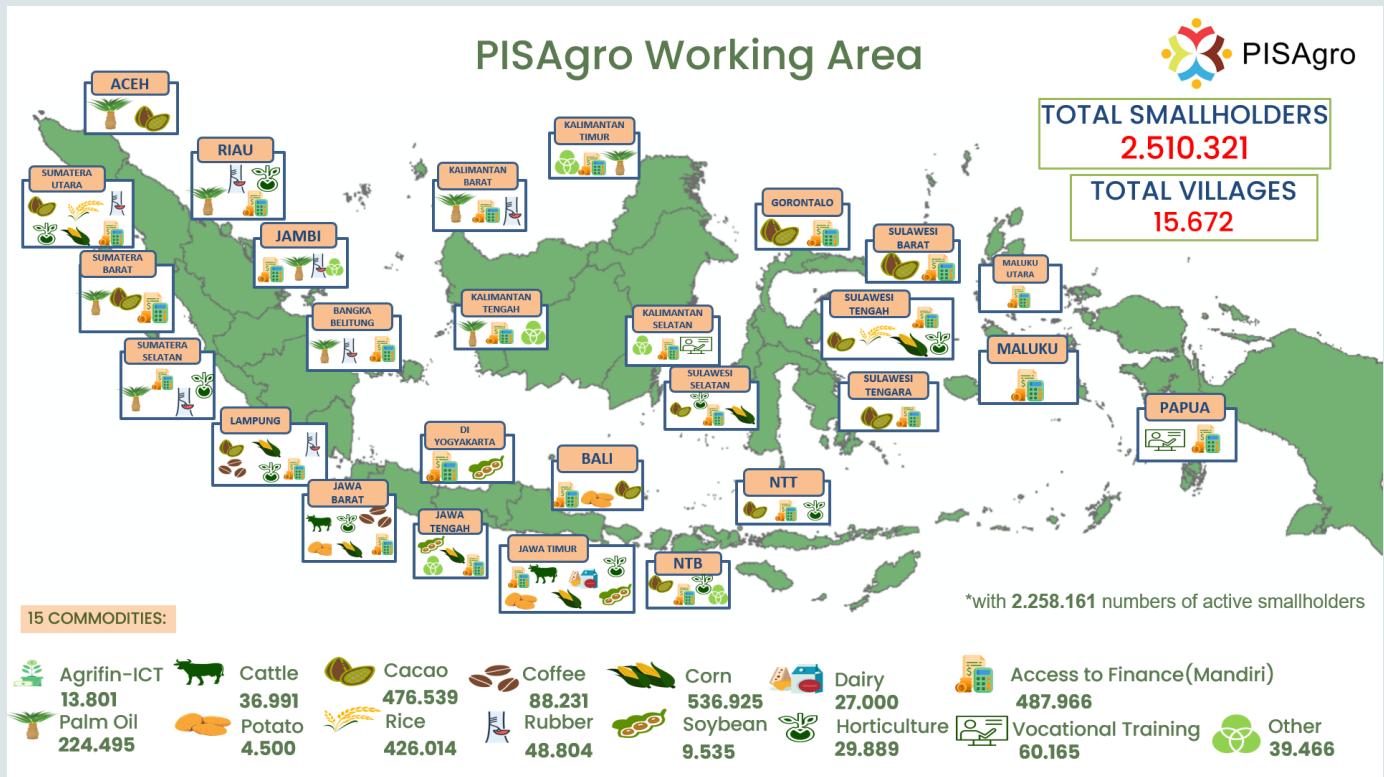
Manajemen Karbon dan Gas Rumah Kaca

33 kampanye **32** sosialisasi **19** pelatihan dilakukan 2-3 kali setiap tahunnya

Highlights

Achievement of PISAgro 2.0 Dashboard - April 2024

Hendri Surya Widcaksana, William Widjaja



TOTAL SMALLHOLDERS
2.510.321

TOTAL VILLAGES
15.672



OVERVIEW



GROWTH

37% of smallholders have the access to financial support
7.577 out of 20.576 (KUR, loans, grants)

93% of total harvest by smallholders are sold to partnered companies (107.941 tons harvest)

22% of smallholders participated in cooperative
4.621 out of 20.576

RESILIENCE

50%

37 out of 74

villages supported by company on their resilience capability



at least
2

health facilities operated in each village supported by company

Type of activities conducted by company to increase smallholders' health condition quality:

35
campaign

32
socialization

occurring 1-2 times a year

SUSTAINABILITY

51%

38 out of 74

villages supported by company to implement sustainability practice

51%
8.494 out of 16.795 ha of land

Type of activities conducted by company to support smallholders implement management waste :

71
campaign

89
socialization

83
trainings

occurring 2-3 times a year

GROWTH

37% of smallholders have the access to financial support (KUR, loans, grants)
7.577 out of 20.576

93% of total harvest by smallholders are sold to partnered companies (107.941 tons harvest)

22% of smallholders participated in cooperative
4.621 out of 20.576

33% of smallholders participated in GAP training conducted by company (occurring 2-3 times a year)

33%

7.031 out of 20.576 of smallholders implemented

Good Agricultural Practice (GAP) in their whole production process

4.380 smallholders implement Good Agricultural Practice in input-sourcing process

4.299 smallholders implement Good Agricultural Practice in post-harvest process

4.140 smallholders implement Good Agricultural Practice in farming operations process

Smallholders' average income per month in each commodities²:



4.2 Million IDR



5.0 Million IDR



2.5 Million IDR



3.5 Million IDR

¹ Good Agricultural Practice (GAP) is a guideline commonly used by smallholders to help them implement sustainability practice in agriculture and to ensure the product quality & safety

RESILIENCE



at least

2

health facilities operated in each village supported by company (puskesmas, posyandu, hospital)

37%

7.529 out of 20.576 of smallholders implemented act of prevention on calamity

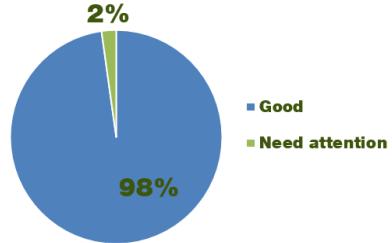


5.373 smallholders used adequate equipment and tools to prevent climate calamity occurrence

5.638 smallholders implemented agricultural practice to prevent fire calamity occurrence

7.645 smallholders implemented agricultural practice to prevent flood calamity occurrence

Smallholders' average health condition in each village²



Type of activities conducted by company to increase smallholders' health condition quality:

35 campaign **32** socialization occurring 1-2 times a year

² based on annual check-up conducted

SUSTAINABILITY



51%

8.494 out of 16.795 ha of land of total land farm from palm oil companies are under implementation of land sustainable management

Activities conducted by company to support smallholders on implementing:

Land Sustainable Management

45 campaign **45** socialization **43** training occurring 2-3 times a year

Waste Management

71 campaign **89** socialization **83** training occurring 2-3 times a year

Biodiversity Management

3 campaign **2** socialization **3** training occurring 1 times a year

GHG & Carbon Management

33 campaign **32** socialization **19** training occurring 2-3 times a year

Sorotan

1. Lokakarya APEC: Mendorong Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Peningkatan Peluang bagi Perempuan di Daerah Terpencil di Seluruh Rantai Pasok Agripangan

Anggota PISAgro, ID FOOD, berpartisipasi mewakili PISAgro sebagai Narasumber Utama dalam "Lokakarya APEC: Mendorong Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Peningkatan Peluang bagi Perempuan di Daerah Terpencil di Seluruh Rantai Pasok Agripangan" yang diadakan di Hanoi, Vietnam pada 11-12 April 2024 lalu.

Pada sesi "E-dagang Mendorong Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di Rantai Pasok Agripangan", ID FOOD memberikan kontribusi terhadap identifikasi peluang, tantangan spesifik, serta potensi kolaborasi dalam adopsi e-dagang bagi perempuan dalam rantai pertanian pangan di Kawasan Asia Pasifik, khususnya dalam implementasinya di Indonesia.

Dalam pidato serta orasinya, Direktur Manajemen Rantai Pasok (SCM) dan Teknologi Informasi (TI) ID FOOD, Bernadetta Raras, menyampaikan sejumlah inisiatif strategis yang dijalankan ID FOOD melalui kolaborasi antarpemerintah, BUMN, dan asosiasi industri, diantaranya berupa pendampingan kepada petani & UMKM perempuan di daerah agar mampu menaikkan produktivitas dan pendapatannya.

Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan adalah melalui program Makmur dan PaDiUMKM yang dijalankan bersama Kementerian BUMN. Selain itu, ID FOOD juga menjalankan inisiatif dan pengembangan digitalisasi untuk memperkuat sektor hilir melalui pembangunan kanal Digital Touch Point market.idfood.co.id, Digital Lelang Dilan, Warung Pangan, dan pembuatan channel online store di e-dagang sehingga memungkinkan ID FOOD untuk melakukan off take produk-produk yang dihasilkan oleh petani.

2. Audiensi dengan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI

Pada tanggal 16 April 2024, PISAgro bersama para anggota dan mitra, mengadakan audiensi dengan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang diselenggarakan di Kementerian Pertanian RI. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan (PPHTP), Bapak Batara Siagian, memimpin sebuah audiensi yang berfokus pada peningkatan produksi dan produktivitas jagung di Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, yang diadakan di Kantor Direktur PPHTP dan dihadiri oleh anggota PISAgro serta perwakilan dari industri, sejumlah poin penting dibahas:

Direktur PPHTP menyampaikan rangkuman materi presentasi yang mencakup pentingnya jagung sebagai komoditas strategis bagi Indonesia, kondisi produksi jagung, serta harga pasar terbaru.

Diskusi yang diinisiasi oleh perwakilan industri, antara lain PT Seger Selaksa Anugrah, PT Global Dairi Alami, dan PT Rajawali Nusantara Indonesia, menyoroti beberapa isu krusial terkait penyerapan pasar, kebutuhan infrastruktur, dan strategi pengembangan produk.

Tanggapan dari Bapak Batara meliputi arahan mengenai penanaman modal, diversifikasi tanaman, dan pengembangan kerja sama dengan pihak terkait untuk mendukung produksi jagung.

Audiensi ini menandai langkah awal dalam merumuskan strategi konkret untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam sektor jagung. Harapannya, langkah-langkah ini akan memperkuat sektor pertanian jagung dan mendukung kesejahteraan petani di Indonesia.

3. Webinar "Mengamankan Nutrisi Tanaman BerkelaJutan: Peran Pupuk dalam Pertanian Regeneratif"

Pada tanggal 25 April 2024, Sekretariat PISAgro menghadiri webinar "Mengamankan Nutrisi Tanaman BerkelaJutan: Peran Pupuk dalam Pertanian Regeneratif" yang diselenggarakan secara daring oleh Innovation Forum bersama salah satu anggota PISAgro, yakni Yara International.

Dalam webinar ini, para pemimpin industri berkumpul untuk membahas keterkaitan mendesak antara praktik-praktik regeneratif, penggunaan pupuk, dan keamanan pangan global. Dialog ini, kaya akan wawasan dari para ahli seperti Paz Panunzio Moscoso, Marina Ettl, dan Jan Willem Sepers, menekankan pentingnya tindakan kolaboratif dalam menavigasi kompleksitas pertanian modern.

Para panelis berbagi strategi praktis bagi mengenai pentingnya praktik pertanian yang berkelanjutan serta aksi kolektif untuk pertanian regeneratif. Tidak hanya itu, para peserta juga memperoleh serangkaian pengetahuan mengenai pertanian regeneratif, pendekatan kolaboratif, serta praktik terbaik untuk mendukung pertanian yang berkelanjutan.

Highlights

1. APEC Workshop on Promoting Women Economic Empowerment through Enhancing Opportunities for Women in Remote Areas across Agri-Food Chains

Member of PISAgro, ID FOOD, participated representing PISAgro as the Keynote Speaker in the "APEC Workshop on Promoting Women Economic Empowerment through Enhancing Opportunities for Women in Remote Areas across Agri-Food Chains" held in Hanoi, Vietnam on April 11-12, 2024.

In the session "E-commerce in Promotion of Women Economic Empowerment in Agri-food Chain," ID FOOD contributed to identifying opportunities, specific challenges, and potential collaborations in the adoption of e-commerce for women in the agricultural food chain in the Asia-Pacific Region, particularly in its implementation in Indonesia.

In her speech and presentation, ID FOOD's Director of Supply Chain Management (SCM) and Information Technology (IT), Bernadetta Raras, presented several strategic initiatives undertaken by ID FOOD through cross-government, state-owned enterprises (BUMN), and industry association collaborations, including mentoring for women farmers and SMEs in rural areas to enhance their productivity and income.

One concrete step taken is through the Makmur and PaDiUMKM programs carried out in collaboration with the Ministry of BUMN. Additionally, ID FOOD is also undertaking initiatives and digitalization developments to strengthen the downstream sector through the development of the Digital Touch Point market.idfood.co.id channel, Digital Lelang Dilan, Warung Pangan, and the establishment of an online store channel in e-commerce, enabling ID FOOD to engage in off-take arrangements for products produced by farmers.

2. Audience with the Directorate General of Food Crops, Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia

On April 16, 2024, PISAgro, along with its members and partners, held an audience with the Directorate General of Food Crops, Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia, organized at the Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia. The Director of Processing and Marketing of Food Crops (PPHTP), Mr. Batara Siagian, led an audience focusing on increasing corn production and productivity in Indonesia. In the meeting, held at the PPHTP Director's Office and attended by PISAgro members and representatives from the industry, several key points were discussed:

The Director of PPHTP presented a summary of the presentation materials covering the importance of corn as a strategic commodity for Indonesia, corn production conditions, and the latest market prices.

Discussions initiated by industry representatives, including PT Seger Selaksa Anugrah, PT Global Dairi Alami, and PT Rajawali Nusantara Indonesia, highlighted several crucial issues related to market absorption, infrastructure needs, and product development strategies.

Mr. Batara's responses included directives regarding investment, crop diversification, and the development of cooperation with relevant parties to support corn production.

This audience marks the initial steps in formulating concrete strategies to address challenges faced in the corn sector. The hope is that these steps will strengthen the corn farming sector and support the welfare of farmers in Indonesia.

3. Webinar "Securing sustainable crop nutrition: the role of fertilizers in regenerative agriculture"

On April 25, 2024, the PISAgro Secretariat attended the webinar "Securing sustainable crop nutrition: the role of fertilizers in regenerative agriculture" organized online by Innovation Forum in collaboration with one of PISAgro's members, Yara International.

In this webinar, industry leaders gathered to discuss the urgent interconnections between regenerative practices, fertilizer use, and global food security. This dialogue, enriched by insights from experts such as Paz Panunzio Moscoso, Marina Ettl, and Jan Willem Sepers, emphasized the importance of collaborative action in navigating the complexities of modern agriculture.

Panelists shared practical strategies regarding the importance of sustainable farming practices and collective actions for regenerative agriculture. Moreover, participants gained a wealth of knowledge about regenerative agriculture, collaborative approaches, and best practices to support sustainable farming.

Profil

Memberdayakan Petani: Percakapan bersama Ibu Fatima, Petani Jagung dari Pamekasan, Jawa Timur

Fathan Oktrisaf, Ferial Lubis, Hendri Surya Widcaksana, Nisrina Alissabila



Dari hamparan lahan pertanian Pamekasan, di tengah-tengah pasang surut musim, sebuah cerita mendalam tentang pemberdayaan dan ketahanan wanita terungkap. Di sini, di tengah latar belakang tantangan dan kemenangan, para petani perempuan berdiri sebagai penjaga kemajuan, mewujudkan semangat yang tak terkalahkan yang menumbuhkan perubahan dan menyuburkan komunitas. Pada edisi ini, kami mengundang Ibu Fatima, seorang petani jagung dari Pamekasan, Jawa Timur.

Dalam wawancara ini, Ibu Fatima menjadi seorang petani sebagai cahaya harapan, bukan hanya untuk keluarganya tetapi juga untuk para petani perempuan di seluruh negeri. Dalam wawancara eksklusif, Ibu Fatima menjelaskan perjalanan, tantangan yang dihadapinya, dan aspirasinya sebagai seorang petani perempuan.

1. Selamat siang, Ibu Fatima. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk berbicara dengan kami. Apa yang membuat Anda bangga sebagai seorang petani perempuan?

Saya sangat bangga karena peran saya melampaui sekadar mendukung suami dan merawat anak-anak. Melalui kerja keras dan dedikasi pada pertanian, saya berkontribusi secara signifikan terhadap pendapatan keluarga kami, menjadi simbol kemandirian dan pemberdayaan.

2. Apa definisi Anda tentang menjadi petani perempuan yang sukses?

Kesuksesan bagi saya adalah perjalanan yang multifaset. Ini bukan hanya tentang menuai panen melimpah tetapi tentang kemampuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya sambil merawat tanah yang dipercayakan kepada saya. Ini tentang menciptakan keseimbangan harmonis antara tugas-tugas keluarga saya dan usaha pertanian saya, memastikan keduanya berkembang di bawah perawatan saya.

3. Apa tantangan yang Anda hadapi sebagai petani perempuan sejauh ini?

Sebagai petani perempuan, tantangan kami unik tetapi terkait erat dengan kehidupan sehari-hari kami. Menyeimbangkan tuntutan merawat keluarga kami dan mengelola pertanian membutuhkan jongkok yang konstan, sering kali meninggalkan kami terbelah antara tanggung jawab.

Selain itu, mengakses informasi dan sumber daya pertanian yang penting bisa sulit, terutama bagi mereka yang mungkin kurang memiliki keterampilan literasi.

4. Menurut Anda, dukungan apa yang diperlukan sebagai petani perempuan?

Dukungan adalah modal utama kesuksesan kami. Pertama, dukungan dan kerjasama tanpa ragu dari suami kami sangatlah penting. Tak kalah pentingnya adalah pengakuan pemerintah terhadap kontribusi kami dan penyediaan bantuan tepat waktu, terutama

selama periode volatilitas pasar. Selain itu, meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan perluasan pertanian, yang disesuaikan untuk mengakomodasi petani dengan berbagai kebutuhan, sangat penting untuk memelihara pertumbuhan dan keberlanjutan di dalam komunitas kami

5. Apa aspirasi Anda untuk usaha pertanian Anda?

Aspirasi saya untuk bisnis pertanian saya berakar dalam stabilitas dan kemakmuran. Saya membayangkan masa depan di mana usaha pertanian jagung saya berkembang pesat, menghasilkan keuntungan yang konsisten setiap tahun. Dengan memaksimalkan profitabilitas, saya bertujuan untuk membangun jaminan keuangan bagi keluarga saya, memastikan masa depan yang aman dan sejahtera bagi generasi mendatang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Fatima atas wawasan yang dibagikannya dan mengucapkan selamat atas kesuksesannya dalam usaha pertaniannya.

Demikian edisi terbaru "Memberdayakan Pertanian" pada tahun 2024, dan kami akan terus menghubungi lebih banyak petani kecil di Indonesia. Tunggu edisi lainnya di PISAgro News berikutnya.

Profile

Empowering Farmers: A Conversation with Mrs. Fatima, a Corn Smallholder from Pamekasan, East Java

Fathan Oktrisaf, Ferial Lubis, Hendri Surya Widcaksana, Nisrina Alissabila

In the vast expanse of Pamekasan's agricultural domain, amidst the ebb and flow of seasons, a profound tale of women empowerment and resilience unfolds. Here, against the backdrop of challenges and triumphs, women farmers stand as stalwarts of progress, embodying the indomitable spirit that cultivates change and nourishes communities. On this edition, we're inviting Mrs. Fatima, a corn farmer from Pamekasan, East Java.

In this interview, Mrs. Fatima stands tall as a beacon of hope, not only for her family but for women farmers across the nation. In an exclusive interview, Mrs. Fatima sheds light on her journey, the challenges she faces, and her aspirations as a woman farmer.

1. Good afternoon, Mrs. Fatima. Thank you for taking the time to speak with us. Anyway, what makes you proud as a woman farmer?

I am immensely proud because my role extends beyond merely supporting my husband and nurturing my children. Through my hard work and dedication to farming, I contribute significantly to our family's income, standing as a beacon of self-reliance and empowerment.

2. What's your definition of being successful women farmer?

Success, for me, embodies a multifaceted



journey. It's not just about reaping bountiful harvests but about the ability to provide for my family's needs while nurturing the land entrusted to me. It's about striking a harmonious balance between my familial duties and my agricultural endeavors, ensuring that both thrive under my care.

3. What challenges do you face as a woman farmer so far?

As women farmers, our challenges are unique yet intertwined with the fabric of our daily lives. Balancing the demands of tending to our families and managing the farm requires constant juggling, often leaving us torn between responsibilities. Additionally, accessing vital agricultural information and resources can be challenging, especially for those of us who may lack literacy skills.

4. What support do you think is needed as a woman farmer?

Support is the cornerstone of our success. Firstly, the unwavering support and cooperation of our husbands are indispensable. Equally crucial is the government's recognition of our contributions and the provision of timely assistance, particularly during periods of market volatility. Moreover, enhancing accessibility to agricultural extension services, tailored to accommodate farmers with diverse needs, is imperative for fostering growth and sustainability within our community.

5. What are your aspirations for your farm business?

My aspirations for my farm business are anchored in stability and prosperity. I envision a future where my corn farming enterprise flourishes, yielding consistent returns year after year. By maximizing profitability, I aim to build a financial cushion for my family, ensuring a secure and prosperous future for generations to come.

We sincerely thank Mrs. Fatima for sharing her insights and congratulate her on her success in her farming endeavors.

Thus concludes the latest edition of "Empowering Farmers" in 2024, and we will continue to reach out to more small-scale farmers in Indonesia. Stay tuned for the next edition in PISAgro News.



Sinarmas Land Plaza, Tower 2,
22nd Floor. Jl. MH Thamrin 51,
Jakarta 10350, Indonesia

contact@pisagro.org [@pisagro_secretariat](https://www.pisagro.org)
www.pisagro.org [Facebook](https://www.facebook.com/PISAgro) [LinkedIn](https://www.linkedin.com/company/pisagro/) PISAgro

Anggota-anggota PISAgro - PISAgro Members



Mitra-mitra PISAgro - PISAgro Partners

